



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi, serta menyediakan informasi keuangan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pasal 296 ayat 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. EKONOMI MAKRO

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 3,69%, lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tumbuh 1,06% dibandingkan kuartal sebelumnya atau 5,02% dibandingkan kuartal IV 2020. Kinerja perekonomian Indonesia ditopang perekonomian global pada kuartal IV menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan purchasing managers index (PMI) global pada Oktober hingga Desember 2021 berada di atas level 50. Hal ini menunjukkan perekonomian global mengalami peningkatan

Pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2021. Ekonomi Tiongkok tumbuh 4%, Amerika Serikat tumbuh 5,5%, Korea Selatan 4,1%, Singapura 5,9%, Vietnam 5,2%, Hong Kong 4,8%, dan Uni Eropa 4,8%. kontribusi ekspor tujuan Tiongkok mencapai 25,8% dari total ekspor, sementara Amerika Serikat berkontribusi 11,8% dan Singapura 3,4%. Perekonomian global secara keseluruhan menunjukkan kenaikan dan negara-negara mitra dagang kita mengalami peningkatan..

Perekonomian Indonesia tahun lalu juga ditopang oleh harga komoditas yang melambung. Harga minyak kelapa Sawit atau CPO pada akhir 2021 naik 42,41% secara tahunan atau 15,8% secara kuartalan, batu bara naik 168,01% secara tahunan dan 8,75% secara kuartal, sedangkan nikel 23,9% secara tahunan dan 3,4% secara kuartalan. Kenaikan harga komoditas ini mendorong ekspor dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ekspansi ekonomi pada kuartal keempat juga ditunjukkan oleh mobilitas masyarakat yang meningkat seiring kasus harian Covid-19 yang menurun. Perbaikan mobilitas berpengaruh pada aktivitas ekonomi domestik, terutama sektor transportasi domestik dan internasional. Mobilitas masyarakat yang membaik juga mendorong perbaikan penjualan eceran pada kuartal keempat yang tumbuh 5,8% secara kuartalan atau 8,7% secara tahunan. Aktivitas penjualan mobil juga tumbuh melesat 10,93% secara kuartalan atau 62,31% secara tahunan. Aktivitas manufaktur menunjukkan bahwa selama kuartal IV berada di level 50,17% atau mengalami ekspansi.

Selain didukung ekspor dan konsumsi masyarakat, realisasi belanja pemerintah juga meningkat pada kuartal keempat. Belanja pegawai turun 0,9% secara kuartalan tetapi naik 2,7% secara tahunan, belanja barang dan jasa secara kuartal naik 72,8% atau 25,1% secara tahunan, sedangkan belanja modal naik 133,7% secara kuartalan atau 10,6% secara tahunan. Adapun belanja bantuan sosial naik 43,5% secara kuartalan atau 23,5% secara tahunan. Untuk program PEN, secara kuartalan meningkat tinggi 55,2% tetapi secara

tahunan menurun 10,1%. Investasi asing dan domestik pada kuartal IV juga mendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat. Penanaman Modal Asing (PMA) naik 18,5% secara kuartalan atau 10,1% secara tahunan, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 5,1% secara kuartalan atau 15,2% secara tahunan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mulai tumbuh kuat. Belanja pemerintah juga tumbuh kuat, sedangkan investasi mulai pulih. Pertumbuhan kredit mulai meningkat. Belanja pemerintah pusat dan daerah pada kuartal keempat juga sangat kuat. Ini memberikan dampak kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal IV sehingga keseluruhan tahun akan cukup baik.

Sementara itu, kajian Bank Indonesia (BI) juga memperkirakan pertumbuhan ada di rentang 3,2%-4%. Bank sentral melihat pemulihan ekonomi semakin terakselerasi sampai akhir tahun ditunjukkan sejumlah indikator, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu juga lebih pesimistis. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sebesar 3,3%. Sementara proyeksi Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu sebesar 3,7% dan semakin kuat pada tahun ini menjadi 5,2%.

Kombinasi antara kondisi pandemi yang relatif terkendali, tren pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, dan stimulus fiskal mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi selama Triwulan 4-2021. Lapangan usaha dengan pertumbuhan nilai tambah yang relatif besar pada Triwulan 4-2021 adalah Jasa Kesehatan (12,16%), Transportasi & Pergudangan (7,93%), Pengadaan Listrik & Gas (7,81%), Informasi & Komunikasi (6,21%), Perdagangan (5,56%), Pertambangan (5,15%), dan Industri Pengolahan (4,92%). Pada Triwulan 4-2021 ekspor barang dan jasa tumbuh impresif sebesar 29,83%, sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB tumbuh masing-masing sebesar 3,55% dan 4,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Triwulan 4-2021 adalah Industri Pengolahan dari sisi lapangan usaha (1,01%) dan konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran (1,91%). Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2021 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,89 persen. Sementara pertumbuhan tertinggi secara spasial dicapai oleh kelompok provinsi di Maluku & Papua yang tumbuh 10,09%.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV 2021 secara kumulatif mencapai 3,32 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang terpuruk -2,65 persen. Dari sisi produksi, menguatnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh tumbuh positifnya semua sektor lapangan usaha, kecuali sektor administrasi pemerintah. Pertumbuhan tertinggi disumbang oleh sektor konstruksi, setelah pada tahun 2020 berkontraksi -3,76 persen. Informasi dan

komunikasi sebesar 6,04 persen, dan pengadaan listrik dan gas sebesar 5,95 persen. Lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memiliki peran dominan juga dikatakan tumbuh positif masing-masing sebesar 2,32 persen, 0,81 persen, dan 5,80 persen.

Begitu pula lapangan usaha lainnya juga tumbuh di antaranya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,92 persen. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 5,87 persen; dan pertambangan dan penggalian sebesar 4,40 persen. Ada pertumbuhan yang masih negatif yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tercatat pada 2021 yaitu sebesar -0,64 persen

Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,32 persen didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif sebesar 1,82 persen. Menguatnya konsumsi rumah tangga ini karena peningkatan kebutuhan rumah tangga, setelah masyarakat mulai terbiasa dengan kondisi pandemi. Selain konsumsi rumah tangga, investasi juga menjadi mesin pendorong pertumbuhan dari sisi penggunaan. Hal ini seiring dengan peningkatan impor barang-barang modal.

Selain kumulatif, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mencapai 5,42 persen (y on y) dan 0,67 persen (q to q), lebih baik dari angka nasional yang hanya sebesar 5,02 persen. secara kumulatif (c-to-c) pada 2021 ini sedikit lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,69 persen.

Di sisi lain, disebutkan, perekonomian Jawa Tengah pada 2021 berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 1.420.799,91 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 997.317,10 miliar. Berdasarkan catatan BPS Jateng, struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 34,31 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,86 persen. Lalu perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,75 persen dan konstruksi sebesar 11,12 persen. Peranan lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 73,04 persen.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi kedua “Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota” dan

program kerja ketiga “Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota Yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi”.

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”**, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif.
3. Pengembangan karir melalui pembinaan karier dan peningkatan kompetensi.
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja dengan metode yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaannya untuk promosi, mutasi dan demosi serta diklat.
6. Penggajian, penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN.
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan dalam pelaksanaan tugas.
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, memiliki 2 (dua) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 48 Sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah dengan 5 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 6 kegiatan dan 32 sub kegiatan;

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ikut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kab/Kota, dan penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program* (PCAP) dan Pendapatan dari sewa tanah bangunan ATM bank Jateng. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2021 mengupayakan beberapa hal yaitu :

1. Menjalankan sistem dan prosedur administrasi pembayaran berbasis *online system* pada fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kab/Kota, serta sewa tanah bangunan ATM bank Jateng di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Optimalisasi dan pemberdayaan Gedung Tes Media Menggunakan Komputer (TMMK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Srandol

Beberapa upaya ini dilakukan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk :

a. Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan pengeluaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek , yaitu terdiri atas:

- 1) Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

KEUANGAN

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan pendapatan sebesar Rp.692.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 653.900.000,00 atau sebesar 94,49%. Sementara dari sisi belanja menganggarkan sebesar Rp. 86.341.207.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.120.845.732,- atau 97,43%. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 84.120.845.732,- terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 83.413.847.032,- dan Realisasi Modal sebesar Rp. 706.998.700,-. Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 48 Sub kegiatan. Berikut ini disajikan anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

TABEL 3.1
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2021

Satuan Kerja Perangkat Kerja : Badan Kepegawaian Daerah
Fungsi : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Fungsi : Kepegawaian
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi		Ket
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.217.780.000	75.204.569.695			
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.839.000	194.024.245	100%	98,07%	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	91.672.000	88.155.645	100%	96,16%	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	106.167.000	105.868.600	100%	99,72%	
2.	Administrasi Keuangan	69.975.916.000	68.620.403.010	100%	98,06%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.925.469.000	68.570.484.310	100%	98,06%	
	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	43.475.000	43.440.000	100%	99,92%	
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	6.972.000	6.478.700	100%	92,92%	
3.	Administrasi Umum	7.044.025.000	6.390.142.440	100%	90,72%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	29.997.000	100%	99,99%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	663.600.000	596.496.291	100%	89,89%	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	430.000.000	408.205.488	100%	94,93%	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	140.000.000	133.520.354	100%	95,37%	Efisiensi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	15.891.900	100%	31,78%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.421.560.000	1.079.340.014	100%	75,93%	`
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	406.000.000	365.955.696	100%	90,14%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	470.000.000	398.977.205	100%	84,89%	Efisiensi

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.872.000	169.186.600	100%	99,01%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.269.000	19.231.000	100%	99,80%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	39.996.000	100%	99,99%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	100%	100,00%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	198.000.000	197.997.018	100%	100,00%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	710.540.000	710.129.495	100%	99,94%	
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	34.000.000	30.750.500	100%	90,44%	Sisa Nego
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	699.000.000	683.587.400	100%	97,80%	
	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	27.242.600	100%	90,81%	Sisa Nego
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	344.391.000	316.145.419	100%	91,80%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	455.381.000	455.256.000	100%	99,97%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	20.000.000	16.237.000	100%	81,19%	Sisa Nego
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	246.412.000	242.687.460	100%	98,49%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5.000.000	5.000.000	100%	100,00%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	50.000.000	49.132.000	100%	98,26%	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	400.000.000	389.180.000	100%	97,30%	
4.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.486.000	184.785.000	100%	99,62%	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	185.486.000	184.785.000	100%	99,62%	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.655.474.000	3.559.081.513	100%	97,36%	
5.	Administrasi Kepegawaian	29.742.000	24.528.000	100%	82,47%	
	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.742.000	24.528.000	100%	82,47%	Efisiensi perjalanan dinas dan sisa nego ATK
6.	Peningkatan Kapastitas ASN	2.919.405.000	2.832.594.179	100%	97,03%	
	Peningkatan Kapasitas ASN	49.849.000	34.931.150	100%	70,07%	Efisiensi perjalanan dinas (hotel,transport)
	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	280.835.000	278.232.598	100%	99,07%	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.228.895.000	2.160.145.700	100%	96,92%	
	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	359.826.000	359.284.731	100%	99,85%	
7.	Pengembangan Karir ASN	706.327.000	701.959.334	100%	99,38%	
	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	706.327.000	701.959.334	100%	99,38%	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.402.356.000	3.339.105.969	100%	98,14%	
8.	Administrasi Kepegawaian	3.402.356.000	3.339.105.969	100%	98,14%	
	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	2.268.284.000	2.225.283.317	100%	98,10%	
	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	408.290.000	405.123.615	100%	99,22%	
	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.	75.000.000	74.177.803	100%	98,90%	
	Pengelolaan Mutasi ASN	150.782.000	149.589.170	100%	99,21%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500.000.000	484.932.064	100%	96,99%	

	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	746.941.000	725.593.494	100%	97,14%	
9.	Peningkatan Kapastitas ASN	96.000.000	92.057.000	100%	95,89%	
	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	96.000.000	92.057.000	100%	95,89%	efesiensi
10.	Pembinaan ASN	650.941.000	633.536.494	100%	97,33%	
	Pembinaan Disiplin ASN	425.478.000	417.630.908	100%	98,16%	
	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	225.463.000	215.905.586	100%	95,76%	efesiensi
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	719.392.000	700.988.028	100%	97,44%	
11.	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	719.392.000	700.988.028	100%	97,44%	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	526.787.000	518.638.649	100%	98,45%	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	192.605.000	182.349.379	100%	94,68%	Sisa Nego
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.705.000	60.662.833	100%	99,93%	
12.	Administrasi Umum	60.705.000	60.662.833	100%	99,93%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.250.000	22.225.000	100%	99,89%	
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	38.455.000	38.437.833	100%	99,96%	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	353.073.000	346.059.200	100%	98,01%	
13.	Peningkatan Kapastitas ASN	353.073.000	346.059.200	100%	98,01%	
	Pengembangan Assessment Center	353.073.000	346.059.200	100%	98,01%	
	JUMLAH	86.341.207.000	84.120.845.732	100%	97,43%	

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh personil Badan Kepegawaian Daerah sesuai kompetensinya masing-masing. Keberhasilan tersebut bisa diukur dari pencapaian kinerja kegiatan dan hasil penyerapan keuangan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar 97,43%. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan, penyerapan keuangan paling sedikit yaitu sebesar 31,78% pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Administrasi Umum.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu Pada Kegiatan Administrasi Umum dengan Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional hanya terserap 31,78% karena adanya kesalahan penganggaran.



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi adalah menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan entitas pemerintah daerah. Selain itu kebijakan akuntansi juga berfungsi sebagai acuan dalam keseragaman penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing – masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas. Kebijakan dan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 disusun disajikan secara akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Peyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan – LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

B. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

C. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidaktertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendaharapenerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

D. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

E. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

F. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

G. Kebijakan Aset Tak Berwujud

Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain. Aset tak berwujud diukur dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

H. Kebijakan Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, maka komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN

KEUANGAN SKPD

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	692.000.000	653.900.000	94,49
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	692.000.000	653.900.000	94,49
Jumlah Pendapatan	692.000.000	653.900.000	94,49
Belanja Daerah	86.341.207.000	84.120.845.732	97,43
Belanja Operasi	85.613.207.000	83.413.847.032	97,43
Belanja Modal	728.000.000	706.998.700	97,12
Jumlah Belanja	86.341.207.000	84.120.845.732	97,43
Surplus / (Defisit)	(85.649.207.000)	(83.466.945.732)	97,45

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah Rp. 653.900.000,00

Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 692.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 653.900.000,00 atau 94,49%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp, 243.100.000,00 atau 59,18% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan (Rp.)
1.	Pendapatan Asli daerah	692.000.000	653.900.000	94,49	410.800.000	243.100.000
2.	Pendapatan Transfer					
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah					
	Jumlah	692.000.000	653.900.000	94,49	410.800.000	243.100.000

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 653.900.000,00

Pendapatan Asli Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 692.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 653.900.000,00 atau 94,49%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp, 243.100.000,00 atau 59,18% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan (Rp.)
1.	Pendapatan Pajak daerah				-	
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	682.000.000	643.900.000	94,41	410.800.000	233.100.000
	Jumlah	692.000.000	653.900.000	94,49	410.800.000	233.100.000

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp.10.000.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100%. Pelaksanaan Pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan (Rp.)
1.	Retribusi Jasa Umum				-	
2.	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000
3.	Retribusi Perizinan Tertentu					
	Jumlah	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000

5.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp.10.000.000,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan (Rp.)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000
2.	Retribusi Tempat Pelelangan					
3.	Retribusi Terminal					
4.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila					
5.	Retribusi Rumah Potong Hewan					
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan					
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga					
8.	Retribusi Penyeberangan di Air					
9.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					
	Jumlah	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000

5.1.1.1.2.2.1. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.10.000.000,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan (Rp.)
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000
2.	Retribusi Pemakaian Laboratorium					
3.	Retribusi Pemakaian Ruangan					
4.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor					
	Jumlah	10.000.000	10.000.000	100	-	10.000.000

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan **mencapai target**.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 643.900.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 682.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 643.900.000 atau 94,41%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 410.800.0000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 233.100.000,00 atau 56,74% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan (Rp.)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan					
2.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan					
3.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan					
4.	Hasil Kerja Sama Daerah					
5.	Jasa Giro					
6.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
7.	Pendapatan Bunga					
8.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah					
9.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	682.000.000	643.900.000	94,41	410.800.0000	233.100.000
10.	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing					
11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah					

13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah					
14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan					
15.	Pendapatan dari Pengembalian					
16.	Pendapatan BLUD					
17.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan					
18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)					
19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
20.	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)					
21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah					
22.	Pendapatan Zakat					
23.	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa					
24.	Pendapatan Lain-Lain SKPKD					
	Jumlah	682.000.000	643.900.000	94,41	410.800.0000	233.100.000

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 berupa Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yang terdiri atas:

1. Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan, berupa Tes Kompetensi (PCAP) memenuhi target.
2. Uang Ujian Kenaikan Tingkat/ Kelas, berupa Fasilitas Ujian Dinas dan UKPPI Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid 19.

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp. 86.341.207.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.84.120.845.732,00 atau 97,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 43.153.249.828,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp. 40.967.595.904,00 atau 94,94% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan / Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Operasi	85.613.207.000	83.413.847.032	97,43	41.937.354.648	41.476.492.384
2.	Belanja Modal	728.000.000	706.998.700	97,12	1.215.895.180	(508.896.480)
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Transfer	-	-	-	-	-
	Jumlah	86.341.207.000	84.120.845.732	97,43	43.153.249.828	40.967.595.904

5.1.2.1. BELANJA OPERASIONAL Rp. 83.413.847.032,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp. 85.613.207.000 ,00 dengan realisasi sebesar Rp. 83.413.847.032,00 atau 97,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 41.937.354.648,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp. 41.476.492.384,00 atau 98,90% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	69.925.469.000	68.570.484.310	98,06	23.323.784.511	45.246.699.799
2.	Belanja Barang dan Jasa	15.687.738.000	14.843.362.722	94,62	18.613.570.137	(3.770.207.415)
3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-
6.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
	Jumlah	85.613.207.000	83.413.847.032	97,43	41.937.354.648	41.476.492.384

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai Rp. 68.570.484.310,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 69.925.469.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 68.570.484.310,00 atau 98,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 23.323.784.511,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp. 45.248.550.517,00 atau 194,00% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan / Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	59.580.017.000	58.371.960.671	97,97	10.180.649.013	48.191.311.658
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.345.452.000	10.200.374.357	98,60	10.824.764.498	(624.390.141)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	2.318.371.000,00	(2.318.371.000)
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-
7.	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-
8.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-
	Jumlah	69.925.469.000	68.570.484.310	98,06	23.323.784.511	45.248.550.517

Belanja Pegawai tidak memenuhi target dikarenakan penyediaan anggaran dihitung dengan estimasi adanya peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu, namun peralihan tersebut baru dilaksanakan di akhir tahun 2021, sehingga penyerapan anggaran belanja pegawai tidak optimal.

5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 58.371.960.671,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 59.580.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.371.960.671,00 atau 97,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya

sebesar Rp. 10.180.649.013,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp. 48.191.311.658,00 atau 473,36% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Kenaikan / Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	46.658.298.000	46.076.096.714	98,75	7.561.108.800	38.514.987.914
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.592.102.000	2.463.833.779	95,05	698.609.702	1.765.224.077
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	325.211.000	271.080.000	83,36	265.130.000	5.950.000
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	395.626.000	286.318.902	72,37	218.338.750	67.980.152
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.932.764.000	3.794.725.000	96,49	277.055.000	3.517.670.000
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.033.361.000	2.900.783.100	95,63	377.525.460	2.523.257.640
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	44.770.000	20.561.398	45,93	21.071.296	(509.898)
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.009.000	992.418	98,36	111.793	880.625
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.203.442.000	2.178.560.492	98,87	699.569.118	1.478.991.374
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	105.335.000	94.752.218	89,95	62.129.094	32.623.124
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	288.099.000	284.256.650	98,67	-	284.256.650
	Jumlah	59.580.017.000	58.371.960.671	97,97	10.180.649.013	48.191.311.658

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp. 10.345.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.200.374.357,00 atau 98,60%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.824.764.498,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 1.452.125.141,00 atau 13,41% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.345.452.000	10.200.374.357	98,60	10.824.764.498	(1.452.125.141)
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-
4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.345.452.000	10.200.374.357	98,60	10.824.764.498	(1.452.125.141)

5.1.2.1.2.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.318.371.000 ,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 2.318.371.000,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
3.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)PNSD	-	-	-	-	-

4.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-
5.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-
6.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-
7.	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2.318.371.000	2.318.371.000
	Jumlah	-	-	-	2.318.371.000	2.318.371.000

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.843.362.722,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 15.687.738.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.843.362.722,00 atau 94,62 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 18.613.570.137,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 3.770.207.415,00 atau 20,26% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Barang	2.853.323.000	2.734.579.488	95,84	4.628.096.538	(1.893.517.050)
2.	Belanja Jasa	8.019.056.000	7.435.785.293	92,73	7.776.672.434	(340.887.141)
3.	Belanja Pemeliharaan	1.107.718.000	1.026.188.779	92,64	1.871.122.405	(844.933.626)
4.	Belanja Perjalanan Dinas	3.707.641.000	3.646.809.162	98,36	4.337.678.760	(690.869.598)
5.	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
6.	Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-
7.	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-
8.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-
	Jumlah	15.687.738.000	14.843.362.722	94,62	18.613.570.137	(3.770.207.415)

Belanja Barang dan Jasa tidak mencapai target dikarenakan adanya efesiensi dan sisa nego/ lelang

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp. 2.734.579.488,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp. 2.853.323.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.734.579.488,00 atau 95,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.628.096.538,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 1.893.517.050,00 atau 40,91%dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.220.000	983.516.270	91,73	1.304.193.806	(320.677.536)
2.	Belanja Bahan/Material	455.381.000	455.256.000	99,97	1.527.970.000	(1.072.714.000)
3.	Belanja Cetak/Penggandaan	424.497.000	404.412.700	95,27	462.567.685	(58.154.985)
4.	Belanja Makanan dan Minuman	901.225.000	891.394.518	98,91	1.228.337.047	(336.942.529)
5.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-	0
6.	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-	0
7.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	-	-	-	105.028.000	(105.028.000)
	Jumlah	2.853.323.000	2.734.579.488	95,84	4.628.096.538	(1.893.517.050)

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp.7.435.785.293,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp.8.019.056.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.435.785.293,00 atau 92,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp.7.776.672.434,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 340.887.141,00 atau 4,38% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Jasa Kantor	4.396.110.000	3.967.945.275	90,26	1.633.315.854	2.334.629.421,00
2.	Belanja Jasa Asuransi	240.920.000	154.475.368	64,12	122.662.395	31.812.973,00
3.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	504.900.000	486.645.000	96,38	246.512.885	240.132.115,00
4.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.600.000	41.950.000	98,47	66.100.000	(24.150.000,00)
5.	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-	-
6.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	431.450.000	403.328.200	93,48	2.982.582.400	(2.579.254.200,00)
7.	Belanja Jasa Konsultansi	532.000.000	528.507.750	99,34	339.646.000	188.861.750,00
8.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.704.000.000	1.686.558.700	98,98	2.153.152.900	(466.594.200,00)
10.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	167.076.000	166.375.000	99,58	232.700.000	(66.325.000,00)
11.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
12.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	8.019.056.000	7.435.785.293	92,73	7.776.672.434	(340.887.141)

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.026.188.779,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp.1.107.718.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.026.188.779,00 atau 92,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.1.871.122.405,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 844.933.626,00 atau 45,16% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-
2.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.327.000	255.839.460	97,16	286.830.500	(30.991.040)
3.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	794.391.000	754.457.419	94,97	1.073.257.000	(318.799.581)
4.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	10.000.000	(10.000.000)
5.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000	15.891.900	31,78	501.034.905	(485.143.005)
	Jumlah	1.107.718.000	1.026.188.779	92,64	1.871.122.405	(844.933.626)

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp.3.646.809.162,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp.3.707.641.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.646.809.162,00 atau 98,36%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.4.337.678.760,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp.690.869.598,00 atau 15,93% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.243.519.000	2.231.021.749	99,44	2.788.596.608	(557.574.859)
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.464.122.000	1.415.787.413	96,70	1.549.082.152	(133.294.739)
3.	Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas	-	-	-	-	-

4.	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.707.641.000	3.646.809.162	98,36	4.337.678.760	(690.869.598)

5.1.2.2 Belanja Modal Rp.706.988.700,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 728.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.706.998.700,00 atau 97,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.215.895.180,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 508.896.480,00 atau 41,85% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	728.000.000	706.998.700	97,12	1.119.590.180	(412.591.480)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	96.305.000	(96.305.000)
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
6.	Belanja Modal Aset Lainnya					
	Jumlah	728.000.000	706.998.700	97,12	1.215.895.180	(508.896.480)

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 706.998.700,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 728.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 706.998.700,00 atau 97,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.119.500.180,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 412.591.480,00 atau 36,85% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-
2.	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	-	-
3.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	4.850.000	(4.850.000)
4.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
5.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-
6.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	76.253.000	69.655.300	91,35	263.264.900	(193.609.600)
7.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15.090.000	13.879.000	91,97	44.516.000	(30.637.000)
8.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-
9.	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
10.	Belanja Modal Komputer	636.657.000	623.464.400	97,93	806.959.280	(183.494.880)
11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-
12.	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-
13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-
14.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-
15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-
16.	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-
17.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-
18.	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-
19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-
	Jumlah	728.000.000	706.998.700	97,12	1.119.500.180	(412.591.480)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak mencapai target dikarenakan adanya sisa negosiasi / Lelang pengadaan Belanja Modal.

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 69.655.300 ,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 76.253.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.655.300,00 atau 91,35%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 263.264.900,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 193.609.600,00 atau 73,54% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-	-
2.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	76.253.000	69.655.300	91,35	263.264.900	(193.609.600)
3.	Belanja Modal Meja dan Kursi	-	-	-	-	-
	Jumlah	76.253.000	69.655.300	91,35	263.264.900	(193.609.600)

5.1.2.2.2.7. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 13.879.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp. 15.090.000 ,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.879.000,00 atau 91,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.44.516.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 30.637.000,00 atau 68,82% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	-	-
2.	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.090.000	13.879.000	91,97	44.516.000	(30.637.000)
3.	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	-	-
4.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi					
	Jumlah	15.090.000	13.879.000	91,97	44.516.000	(30.637.000)

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer Rp. 623.464.400,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp. 636.657.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 623.464.400,00 atau 97,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 806.959.280,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 183.494.880,00 atau 22,74% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	2021 (Rp.)	%	2020 (Rp.)	Penurunan (Rp.)
1.	Belanja Modal Komputer Unit	636.657.000	623.464.400	97,93	806.959.280	(183.494.880)
2.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-	-
	Jumlah	636.657.000	623.464.400	97,93	806.959.280	(183.494.880)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset Rp. 14.144.684.325,13

Total Aset sebesar Rp. 14.144.684.325,13 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 15.342.803.598,74 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 1.198.119.273,61 atau 7,81%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Aset Lancar	302.171.892,00	347.419.810,00
2.	Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap	13.842.512.433,13	14.995.383.788,74
4.	Dana Cadangan	-	-
5.	Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	14.144.684.325,13	15.342.803.598,74

5.2.1.1 Aset Lancar Rp. 302.171.892 ,00

Aset Lancar sebesar Rp. 302.171.892,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 347.419.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 45.247.918,00,00 atau 13,02% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Kas dan Setara Kas	-	-
2.	Investasi Jangka Pendek	-	-
3.	Piutang Pajak Daerah		
4.	Piutang Retribusi Daerah		
5.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
7.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
8.	Piutang Transfer Antar Daerah		
9.	Piutang Lainnya		
10.	Penyisihan Piutang		
11.	Beban Dibayar Dimuka		
12.	Persediaan	302.171.892,00	347.419.810,00
	Jumlah	302.171.892,00	347.419.810,00

5.2.1.1.12 Persediaan Rp. 302.171.892,00

Persediaan sebesar Rp. 302.171.892,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 347.419.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 45.247.918,00,00 atau 13,02% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Barang Pakai Habis	302.171.892,00	347.419.810,00
	Jumlah	302.171.892,00	347.419.810,00

5.2.1.1.12.1 Barang Pakai Habis Rp. 302.171.892,00

Barang Pakai Habis sebesar Rp. 302.171.892,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 347.419.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 45.247.918,00,00 atau 13,02% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Bahan	-	-
2.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	302.171.892,00	347.419.810,00
3.	Obat-Obatan		
4.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan		
5.	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
6.	Natura dan Pakan		
	Jumlah	302.171.892,00	347.419.810,00

5.2.1.1.12.1.2 Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp. 302.171.892,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar sebesar Rp. 302.171.892,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 347.419.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 45.247.918,00,00 atau 13,02% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1.	Alat Tulis Kantor	302.171.892,00	347.419.810,00
2.	Kertas dan Cover		
3.	Bahan Cetak		
4.	Benda Pos		
5.	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
6.	Bahan Komputer		
7.	Perabot Kantor		
8.	Alat Listrik		
9.	Perlengkapan Dinas		
10.	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa		
11.	Perlengkapan Pendukung Olahraga		
12.	Suvenir/Cendera Mata		
13.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
	Jumlah	302.171.892,00	347.419.810,00

5.2.1.2. Aset Tetap Rp. 35.568.318.832,00

Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 35.568.318.832,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 739.660.900,00 atau 2,12% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 34.828.657.932,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021
Tanah	6.427.650.000	0	0	6.427.650.000
Peralatan dan Mesin	18.763.714.930	1.393.466.100	653.805.200	19.503.375.830
Gedung dan Bangunan	8.701.526.902			8.701.526.902
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	799.998.000			799.998.000
Aset Tetap Lainnya	39.463.100			39.463.100
Konstruksi dalam Pengerjaan	96.305.000			96.305.000
Jumlah	34.828.657.932	1.393.466.100	653.805.200	35.568.318.832

Rincian Mutasi Aset Tetap yaitu :

Saldo 31 Desember 2020	Rp.	34.828.657.932
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	706.998.700
Belanja Barang/Jasa	Rp.	34.581.800
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp.	651.885.600
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	1.393.466.100
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	1.919.60
Reklasifikasi keluar antar aset tetap	Rp.	651.885.600
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	653.805.200
Saldo 31 Desember 2020	Rp.	35.568.318.832

5.2.1.2.1. Tanah Rp.6.427.650.000,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.427.650.000,00 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.427.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021
Tanah	6.427.650.000	0	0	6.427.650.000
Jumlah	6.427.650.000	0	0	6.427.650.000

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin Rp. 19.503.375.830,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.503.375.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 739.660.900,00 atau 3,94% dibandingkan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 18.763.714.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021
Alat Besar	810.245.000	-	-	810.245.000
Alat Angkutan	3.660.554.721	-	-	3.660.554.721
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-	-	-
Alat Pertanian	-	-	-	-
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	6.658.804.591	124.526.900	16.461.800	6.766.869.691
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	371.475.856	26.462.800	13.879.000	384.059.656
Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	216.001.615	-	-	216.001.615
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Persenjataan	-	-	-	-
Alat Komputer	6.880.480.397	1.242.476.400	623.464.400	7.499.492.397
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-	-	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
Rambu Rambu	-	-	-	-
Peralatan Olah Raga	166.152.750	-	-	166.152.750
Jumlah	18.763.714.930	1.393.466.100	653.805.200	19.503.375.830

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Saldo 31 Desember 2020	Rp.	18.763.714.930
Penambahan	Rp.	
Belanja Modal	Rp.	706.988.700
Belanja Barang/Jasa	Rp.	34.581.800
Hibah	Rp.	
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp.	651.885.600
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	
Koreksi	Rp.	
Jumlah	Rp.	1.393.456.100
Berkurang	Rp.	
Ekstrakontable	Rp.	1.919.600
Reklasifikasi keluar antar aset tetap	Rp.	651.385.600
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	
Koreksi	Rp.	
Jumlah	Rp.	653.305.200
Saldo 31 Desember 2020	Rp.	19.503.865.830

5.2.1.2.3. **Gedung dan Bangunan Rp. 8.701.526.902,00**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.701.526.902,00 sama dengan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021
Gedung	8.701.526.902	-	-	8.701.526.902
Monumen				
Jumlah	8.701.526.902	-	-	8.701.526.902

5.2.1.2.4. **Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.799.998.000,00**

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.799.998.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan saldo per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	799.998.000	0	0	799.998.000
Jaringan				
Jumlah	799.998.000	0	0	799.998.000

5.2.1.2.5. **Aset Tetap Lainnya Rp. 39.463.100,00**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 39.463.100,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan saldo per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020	Bertambah	Berkurang	2021
Buku Perpustakaan	35.073.100	0	0	35.073.100
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	4.390.000	0	0	4.390.000
Hewan				
Biota Perairan				
Tanaman				
Barang Koleksi Non Budaya				
Aset Tetap Renovasi				
Jumlah	39.463.100	0	0	39.463.100

5.2.1.3. **Akumulasi Penyusutan Rp. 21.725.806.398,86**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 21.725.806.398,86 mengalami kenaikan sebesar 1.892.532.255,86 atau 9,54% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.833.274.143 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Alat-alat Besar	(691.669.000,00)	(591.318.500)
2	Alat-alat Angkutan	(3.509.015.096,00)	(3.296.965.194)
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.877.486.829,48)	(5.105.236.816)
4	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(333.190.525,99)	(316.120.776)
5	Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	(149.523.243,80)	(116.284.058)
6	Alat-alat Komputer	(6.468.766.640,39)	(5.914.547.387)
7	Alat-alat Olahraga	(163.237.062,50)	(160.321.375)
8	Bangunan Gedung	(4.173.025.550,70)	(3.992.587.537)
9	Instalasi	(359.892.450,00)	(339.892.500)
	JUMLAH	(21.725.806.398,86)	(19.833.274.143)

5.2.1.4. Aset Lainnya Rp.0,00

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Tagihan Jangka Panjang	0	0
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
3	Aset Tak Berwujud	151.539.500	151.539.500
4	Aset Lain-Lain	0	587.862.118
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(151.539.500)	(151.539.500)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	(587.862.118)
	JUMLAH	0	0

5.2.1.4.1. Aset Tidak Berwujud Rp.151.539.500,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp.151.539.500,00 sama dengan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.151.539.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Aset Tak berwujud – Lisensi dan Frenchise	0	0
2	Aset Tak berwujud - Software	151.539.500	151.539.500
3	Aset Tak berwujud – Kajian	0	0
4	Aset Tak berwujud – Lainnya	0	0
	JUMLAH	151.539.500	151.539.500

5.2.1.4.2. Aset Lain-Lain Rp. 0,00

Adapun Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar 100% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar 587.862.118 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Aset Rusak Berat - usang	0	587.862.118
2	Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
3	Aset Tetap Lain-lain	0	0
	JUMLAH	0	587.862.118

Barang Rusak Berat tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penghapusan (SK Penghapusan terlampir)

5.2.1.4.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp.151.539.500,00

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp.151.539.500,00 sama dengan Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020. Rp.151.539.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud – Lisensi dan Frenchise		
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud - Software	151.539.500	151.539.500
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud – Kajian		
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud – Lainnya		
	JUMLAH	151.539.500	151.539.500

5.2.1.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp. 0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar 100% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar 587.862.118 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat - usang	0	587.862.118
2	Akumulasi Penyusutan Aset yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lain-lain	0	0
	JUMLAH	0	587.862.118

5.2.2. EKUITAS Rp. 14.144.684.325,13

Ekuitas sebesar Rp. 14.144.684.325,13 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 15.342.803.598,74 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.198.119.273,61 atau 7,81 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas	(111.478.768.716,87)	(27.399.646.229,26)
2	Ekuitas SAL		
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	125.623.453.042,00	42.742.449.828,00
	JUMLAH	14.144.684.325,13	15.342.803.598,74

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	653.900.000	410.800.000	243.100.000
2	Beban	85.318.965.006	44.319.828.914	40.999.136.092
	Surplus/(Defisit) Operasional	(84.665.065.006)	(43.909.028.914)	(40.756.036.092)
3	Kegiatan Non Operasional	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(84.665.065.006)	(43.909.028.914)	(40.756.036.092)
4	Pos Luar Biasa			-
	Surplus / (Defisit) Laporan Operasional	(84.665.065.006)	(43.909.028.914)	(40.756.036.092)

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp. 653.900.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 243.100.000,00 atau 59,18% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

	LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	653.900.000	-	-	653.900.000	410.800.000	243.100.000	59,18
2. Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	-	-	-	-
3.. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	653.900.000			653.900.000	410.800.000	243.100.000	59,18

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 653.900.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 243.100.000,00 atau 59,18% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar sebesar Rp. 410.800.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.000.000	-	-	10.000.000	410.800.000	400.800.000	97,57
3..	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	643.900.00 0	-	-	643.900.000	-	643.900.000	100
JUMLAH		653.900.00 0			653.900.000	410.800.000	243.100.000	59,18

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah - LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. Dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO	-	-	-	-	410.800.000	410.800.000	100
2.	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	100
3..	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO							
JUMLAH		10.000.000			10.000.000	410.800.000	400.800.000	97,57

5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 609.040.000,00,00) atau (40,28%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp. 1.019.840.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
4.	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jasa Giro - LO	-	-	-	-	-	-	-
6.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pendapatan Bunga - LO	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	643.900.000	-	-	643.900.000	-	643.900.000	100
10.	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-

14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pendapatan dari Pengembalian - LO	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pendapatan BLUD - LO	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	-	-	-	-	-	-	-
19.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-	-	-	-
20.	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
22.	Pendapatan Zakat - LO	-	-	-	-	-	-	-
23.	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa - LO	-	-	-	-	-	-	-
24.	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	643.900.000	-	-	643.900.000	-	643.900.000	100

5.3.2. BEBAN DAERAH

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp85.318.965.005,61 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 44.319.828.913,55 mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.915.865.921,94,00 atau 94,58 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Beban Operasional	83.413.847.032,00	349.339.410,00	336.753.692,00	83.426.432.750,00	41.968.931.743,00	41.457.501.007,00	98,78%
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	1.892.532.255,61	0	1.892.532.255,61	2.350.897.170,55	458.364.914,94	19,50%
3..	Beban Transfer	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH	83.413.847.032,00	2.241.871.665,61	336.753.692,00	85.318.965.005,61	44.319.828.913,55	41.915.865.921,94	94,58%

Total Belanja Daerah	:	83.413.847.032,00
Penambahan		
Persediaan Tahun 2020	:	347.419.810,00
Beban Penyusutan	:	1.892.532.255,61
Beban Lain-lain (beban barang Ekstrakomptabel)	:	1.919.600,00
Total Penambahan		2.241.871.665,61
Pengurangan		
Koreksi Persediaan Tahun 2021	:	302.171.892,00
Reklas dari Belanja Barang	:	34.581.800,00
Total Pengurangan	:	336.753.692,00
Total Beban Daerah	:	85.318.965.005,61

5.3.2.1. Beban Operasional Rp. 83.426.432.750,00

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp. 83.426.432.750,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 41.968.931.743,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 41.457.501.007,00 atau 98,78% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	68.570.484.310,00	-	-	68.570.484.310,00	23.323.784.511,00	45.246.699.799,00	193,99%
2	Beban Barang dan Jasa	14.843.362.722,00	347.419.810,00	336.753.692,00	14.854.028.840,00	18.645.147.232,00	3.791.118.392,00	20,33%
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
4	Beban Subsidi	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
5	Beban Hibah	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
7	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
8	Beban Lain-Lain	-	1.919.600,00	-	1.919.600,00	-	1.919.600,00	0,00%
JUMLAH		83.413.847.032,00	349.339.410,00	336.753.692,00	83.426.432.750,00	41.968.931.743,00	41.457.501.007,00	98,78%

Total Belanja Operasional	:	83.413.847.032,00
Penambahan		
Persediaan Tahun 2020	:	347.419.810,00
Beban Lain-lain (beban barang Ekstrakomptabel)	:	1.919.600,00
Total Penambahan		349.339.410,00
Pengurangan		
Koreksi Persediaan Tahun 2021	:	302.171.892,00
Reklas dari Belanja Barang	:	34.581.800,00
Total Pengurangan	:	336.753.692,00
Total Beban Operasional	:	83.426.432.750,00

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 68.572.335.028,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 23.323.784.511,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 45.248.550.517,00 atau 194% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	58.371.960.671	-	-	58.371.960.671	10.180.649.013	48.191.311.658	473,36%
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.200.374.357	-	-	10.200.374.357	10.824.764.498	-624.390.141	-5,77%
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.318.371.000	-2.318.371.000	-100,00%
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD							
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH							
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH							
7.	Beban Pegawai BOS							
8.	Beban Pegawai BLUD							
JUMLAH		68.572.335.028	0	0	68.572.335.028	23.323.784.511	45.248.550.517	194,00%

5.3.2.1.1.1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 58.371.960.671,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp. 58.371.960.671,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.180.649.013,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp. 48.191.311.658,00 atau 473,36% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji Pokok ASN	46.076.096.714	-	-	46.076.096.714	7.561.108.800	38.514.987.914	509,38%
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.463.833.779	-	-	2.463.833.779	698.609.702	1.765.224.077	252,68%
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	271.080.000	-	-	271.080.000	265.130.000	5.950.000	2,24%
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	286.318.902	-	-	286.318.902	218.338.750	67.980.152	31,14%
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.794.725.000	-	-	3.794.725.000	277.055.000	3.517.670.000	1269,66%
6	Beban Tunjangan Beras ASN	2.900.783.100	-	-	2.900.783.100	377.525.460	2.523.257.640	668,37%
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.561.398	-	-	20.561.398	21.071.296	(509.898)	-2,42%
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	992.418	-	-	992.418	111.793	880.625	787,73%
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.178.560.492	-	-	2.178.560.492	699.569.118	1.478.991.374	211,41%
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	94.752.218	-	-	94.752.218	62.129.094	32.623.124	52,51%
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	284.256.650	-	-	284.256.650	-	284.256.650	100,00%
JUMLAH		58.371.960.671	-	-	58.371.960.671	10.180.649.013	48.191.311.658	473,36%

5.3.2.1.1.2. **Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp,00**

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp. 10.200.374.357,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.824.764.498,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 624.390.141,00 atau 5,77% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.200.374.357			10.200.374.357	10.824.764.498	(624.390.141)	(5,77%)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN							
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN							
JUMLAH		10.200.374.357	-	-	10.200.374.357	10.824.764.498	(624.390.141)	(5,77%)

5.3.2.1.1.3. **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp,0,00**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp.0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.318.971.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.318.971.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
2.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG)PNSD	-	-	-	-	-	-	-
4.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	-	-

5.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-	-
6.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beban Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	2.318.371.000	(2.318.371.000)	100%
JUMLAH		-	-	-	-	2.318.371.000	(2.318.371.000)	100%

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp.14.854.028.840,00

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.14.854.028.840,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.18.613.570.137,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp.3.759.541.297,00 atau 20,20 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1.	Beban Barang	2.734.579.488,00	347.419.810,00	336.753.692,00	2.745.245.606,00	4.628.096.538,00	(1.882.850.932,00)	(40,68%)
2.	Beban Jasa	7.435.785.293,00	-	-	7.435.785.293,00	7.776.672.434,00	(340.887.141,00)	(4,38%)
3.	Beban Pemeliharaan	1.026.188.779,00	-	-	1.026.188.779,00	1.871.122.405,00	(844.933.626,00)	-45,16%
4.	Beban Perjalanan Dinas	3.646.809.162,00	-	-	3.646.809.162,00	4.337.678.760,00	(690.869.598,00)	-15,93%
5.	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
6.	Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	-
8.	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		14.843.362.722	347.419.810	336.753.692	14.854.028.840	18.613.570.137	(3.759.541.297)	-20,20%

Total Belanja Barang dan Jasa Penambahan	:	14.843.362.722
Persediaan Awal Tahun 2021	:	347.419.810
Total Penambahan		347.419.810
Pengurangan		
Persediaan Akhir Tahun 2021	:	302.171.892
Reklas dari Belanja Barang	:	34.581.800
Total Pengurangan	:	336.753.692
Total Beban Barang dan Jasa	:	14.854.028.840

5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp. 2.745.245.606,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 4.523.068.538,00 atau 39,31% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bahan Pakai Habis	983.516.270,00	347.419.810,00	336.753.692,00	994.182.388,00	1.304.193.806,00	(310.011.418,00)	-23,77%
2	Beban Bahan/Material	455.256.000,00	-	-	455.256.000,00	1.527.970.000,00	(1.072.714.000,00)	-70,21%
3	Beban Cetak/Penggandaan	404.412.700,00	-	-	404.412.700,00	462.567.685,00	(58.154.985,00)	-12,57%
4	Beban Makanan dan Minuman	891.394.518,00	-	-	891.394.518,00	1.228.337.047,00	(336.942.529,00)	-27,43%

5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Beban Pakaian Kerja	-	-	-	-	-	-	0,00%
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH		2.734.579.488	347.419.810	336.753.692	2.745.245.606	4.523.068.538	(1.777.822.932)	(39,31%)

Total Belanja Barang	:	2.734.579.488
Penambahan		
Persediaan Awal Tahun 2021	:	347.419.810
Total Penambahan		347.419.810
Pengurangan		
Persediaan Akhir Tahun 2021	:	302.171.892
Reklas dari Belanja Barang	:	34.581.800
Total Pengurangan	:	336.753.692
Total Beban Barang	:	2.745.245.606

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa Rp. 7.435.785.293,00

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp.7.435.785.293,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.776.672.434,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 2.923.311.650,00 atau 37,59% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	3.967.945.275,00	-	-	3.967.945.275,00	1.633.315.854,00	2.334.629.421,00	142,94%
2	Beban Jasa Asuransi	154.475.368,00	-	-	154.475.368,00	122.662.395,00	31.812.973,00	25,94%
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	486.645.000,00	-	-	486.645.000,00	246.512.885,00	240.132.115,00	97,41%
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	41.950.000,00	-	-	41.950.000,00	66.100.000,00	(24.150.000,00)	-36,54%
5	Beban Sewa Alat Berat	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	403.328.200,00	-	-	403.328.200,00	2.982.582.400,00	(2.579.254.200,00)	-86,48%
7	Beban Jasa Konsultansi	528.507.750,00	-	-	528.507.750,00	339.646.000,00	188.861.750,00	55,61%
8	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-	0,00%
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.686.558.700,00	-	-	1.686.558.700,00	2.153.152.900,00	(466.594.200,00)	-21,67%
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	166.375.000,00	-	-	166.375.000,00	232.700.000,00	(66.325.000,00)	-28,50%
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai NonASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH		7.435.785.293	-	-	7.435.785.293	7.776.672.434	(2.923.311.650)	-37,59%

5.3.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan Rp. 1.026.188.779,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp. 1.026.188.779,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.871.122.405,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp. 844.933.626,00 atau -45,16% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	255.839.460,00	-	-	255.839.460,00	286.830.500,00	(30.991.040,00)	-10,80%
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	754.457.419,00	-	-	754.457.419,00	1.073.257.000,00	(318.799.581,00)	-29,70%
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-100,00%
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	15.891.900,00	-	-	15.891.900,00	501.034.905,00	(485.143.005,00)	-96,83%
	JUMLAH	1.026.188.779,00	-	-	1.026.188.779,00	1.871.122.405,00	(844.933.626,00)	-45,16%

5.3.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp. 3.646.809.162,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.4.337.678.760,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp.690.869.598,00 atau 15,93% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.231.021.749	-	-	2.231.021.749	2.788.596.608	-557.574.859	-19,99%
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.415.787.413	-	-	1.415.787.413	1.549.082.152	-133.294.739	-8,60%
3	Beban Perjalanan Dinas Pindah Tugas	-	-	-	-	-	-	0,00%
4	Beban Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH	3.646.809.162,00	-	-	3.646.809.162,00	4.337.678.760,00	(690.869.598,00)	-15,93%

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp. 1.892.532.255,55

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp.1.892.532.255,55 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.350.897.170,55 mengalami **penurunan** sebesar Rp.458.364.915,00 atau 19,50 % dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.692.094.292,00	2.150.459.207,00	(458.364.915,00)	-21,31%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	180.438.013,55	180.438.013,55	-	-
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.999.950,00	19.999.950,00	-	-
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	1.892.532.255,55	2.350.897.170,55	(458.364.915,00)	-19,50%

5.3.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp.1.692.094.295,06

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp.1.692.094.295,06 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.2.150.459.207,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp.458.364.911,94 atau 21,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	100.350.500,00	100.350.500,00	-	-
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	212.049.905,50	277.461.902,50	(65.411.997,00)	-23,58%
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	0,00%
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	0,00%
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	772.250.013,08	842.572.691,40	(70.322.678,32)	-8,35%
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.069.749,99	23.890.020,00	(6.820.270,01)	-28,55%
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.239.185,60	33.239.185,60	-	0,00%
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	0,00%
9	Beban Penyusutan Komputer	554.219.253,39	870.029.220,00	(315.809.966,61)	-36,30%
10	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	0,00%
11	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	0,00%
12	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	0,00%
13	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	0,00%
14	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	0,00%
15	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	0,00%
16	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	0,00%
17	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	-	-	-	0,00%
18	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	2.915.687,50	2.915.687,50	-	0,00%
JUMLAH		1.692.094.295,06	2.150.459.207,00	(458.364.911,94)	-21,31%

5.3.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp.180.438.013,55,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp. 180.438.013,55 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 180.438.013,55 tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	180.438.013,55	180.438.013,55	-	0,00%
2	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	0,00%
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	0,00%
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	0,00%
JUMLAH		180.438.013,55	180.438.013,55	-	0,00%

5.3.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.19.999.950,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.19.999.950,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.19.999.950,00 tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	0,00%
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	-	-	-	0,00%
3	Beban Penyusutan Instalasi	19.999.950,00	19.999.950,00	-	0,00%
4	Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-	0,00%
JUMLAH		19.999.950,00	19.999.950,00	-	0,00%

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	Tren %
1	Ekuitas Awal	15.342.803.598,74	16.447.469.504,29	(1.104.665.905,55)	-6,72%
2	Surplus/Defisit-LO	(84.665.065.005,61)	(43.909.028.913,55)	(40.756.036.092,06)	92,82%
3	RK-PPKD	83.466.945.732,00	42.742.449.828,00	40.724.495.904,00	95,28%
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian		61.913.180,00	(61.913.180,00)	-100,00%
	Ekuitas Akhir	14.144.684.325,13	15.342.803.598,74	(1.198.119.273,61)	-7,81%

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 15.342.803.598,74 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp.84.665.065.005,61) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basisakrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2021.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp,00



Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan bahwa "Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah".

Berdasar Ketentuan Tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

Oleh karena itu, pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang *Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)* dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menempati kantor di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Sehubungan dengan adanya PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga baru yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian yaitu **“Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”** sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program kegiatan setiap tahunnya. Dalam mengemban misinya dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komputer dengan mendayagunakan serta meningkatkan kemampuan personilnya. Hasilnya telah terwujud beberapa program aplikasi komputer untuk pengelolaan data dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Di samping itu sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, telah dikembangkan beberapa program kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kualitas manajemen kepegawaian.

6.2 Penyelenggaraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Widadi, SH | 30 Juni 2001 s/d 4 Maret 2006 |
| 2. Drs Agus Setianto | 4 Maret 2006 s/d 31 Agustus 2011 |
| 3. Suko Mardiono, SH, MM | 9 September 2011 s/d 29 Januari 2015 |
| 4. Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si | 1 Februari 2015 s/d 25 Januari 2019 |
| 5. Drs.Wisnu Zaroh, M.Si | 6 Mei 2019 s/d sekarang |

6.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.

6.3.2 Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif.
3. Pengembangan karir melalui pembinaan karier dan peningkatan kompetensi.
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja dengan metode yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaannya untuk promosi, mutasi dan demosi serta diklat.
6. Penggajian, penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN.
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan dalam pelaksanaan tugas.
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

6.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis di bidang kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

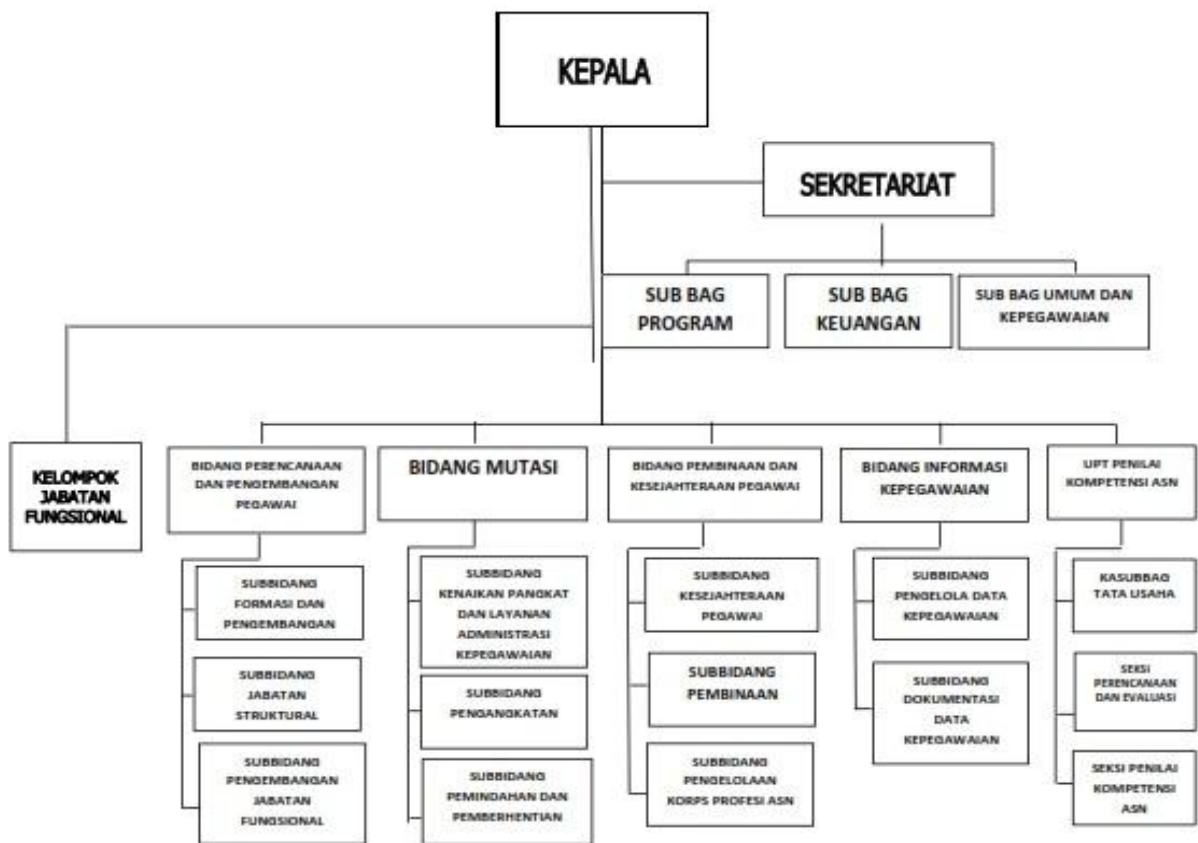
6.4.2. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Di dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Formasi dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Jabatan Struktural; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengangkatan; dan
 - c. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

- b. Subbidang Pembinaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
- 6. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengelola Data Kepegawaian; dan
 - b. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi ASN.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Fungsional Tenaga Kesehatan di Poliklinik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi dokter dan perawat;
 - b. Fungsional Assessor Sumberdaya Aparatur;
 - c. Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :





Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB VII PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi JawaTengah Tahun 2020 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 653.900.000,00 atau mencapai 94,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 692.000.000,00

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 84.120.845.732,00 atau mencapai 97,43 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 86.341.207.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.144.684.325,13 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp. 302.171.892,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar .13.842.512.433,13 dan Aset Lainnya sebesar Rp.0,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan 14.144.684.325,13

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non- operasional, dan surplus/(defisit) LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Surplus/defisit sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar minus Rp.84.665.065.005,61. Jumlah tersebut terdiri atas defisit dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.84.665.065.005,61 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp.653.900.000,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp.85.318.965.005,61.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp.15.342.803.598,74,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 84.665.065.005,61

sehingga Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 14.144.684.325,13.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2021. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.